

ISSN : 2654-9891
Katalog : 4401002.91

Statistik Kriminal Provinsi Papua Barat 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT**

Statistik Kriminal Provinsi Papua Barat 2021



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT

STATISTIK KRIMINAL PROVINSI PAPUA BARAT 2021

ISSN : 2654-9891
Nomor Publikasi : 91000.2219
Katalog BPS : 4401002.91
Ukuran Buku : 16,5 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xiv + 54 halaman

Naskah:
BPS Provinsi Papua Barat

Penyunting:
BPS Provinsi Papua Barat

Gambar Kulit:
BPS Provinsi Papua Barat

Diterbitkan Oleh:
© Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

Dicetak Oleh:
CV. Nario Sari

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun

Pengarah:

Maritje Pattiwaellapia, SE, M.Si

Penanggung Jawab Teknis:

Ika Rusinta Widiyasari, S.ST, M.PP

Penyunting:

Ika Rusinta Widiyasari, S.ST, M.PP

Penulis:

Latifah Andriani, S.ST

Pengolah Data:

Fadel Fahroni, S.ST

Gambar Kulit dan Desain Infografis:

Fadel Fahroni, S.ST

Kata Pengantar

Publikasi Statistik Kriminal Provinsi Papua Barat 2021 ini merupakan edisi kesembilan yang menyajikan data dan informasi terkait keamanan dan kriminalitas yang terjadi di Papua Barat.

Data yang disajikan dalam publikasi ini bersumber dari Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat dan Polres/Polresta se-Papua Barat. Selain itu, beberapa data pendukung lainnya diperoleh dari kegiatan *Updating Potensi Desa (Podes)* 2021 yang diselenggarakan oleh BPS. Data dari kepolisian menggambarkan situasi keamanan yang diindikasikan dari banyaknya kejadian kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian. Sementara itu, data Podes menggambarkan situasi keamanan di wilayah desa/kelurahan yang bersumber dari aparat desa setempat.

Akhir kata, kami berharap agar publikasi ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pengambil keputusan sebagai acuan atau rujukan dalam rangka penyusunan arah dan kebijakan pembangunan terutama pembangunan di bidang keamanan. Kami menyadari bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu berbagai masukan, kritik, dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan publikasi di masa mendatang.

Manokwari, Oktober 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Papua Barat



Maritje Pattiwaellapia, SE, M.Si

Ringkasan Eksekutif

Publikasi Statistik Kriminal Provinsi Papua Barat 2021 menyajikan gambaran umum mengenai tingkat dan perkembangan kriminalitas di Provinsi Papua Barat pada tahun 2021. Informasi yang disajikan mencakup dua pendekatan utama statistik kriminal, yakni pendekatan pelaku (Data Registrasi Kepolisian) dan pendekatan kewilayahan (Pendataan Potensi Desa/Podes).

Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat mencatat bahwa selama periode 2013 – 2021 jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas (*crime total*) di Papua Barat berjalan fluktuatif. *Crime total* pada tahun 2013 sebanyak 2.262 kejadian kejahatan dan mengalami peningkatan tajam pada tahun 2016 menjadi 3.621 kejadian lalu menurun tajam lagi menjadi 2.648 kejadian kejahatan pada tahun 2021. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat risiko terkena tindak kejahatan setiap 100 ribu penduduk (*crime rate*) di Papua Barat juga fluktuatif. Selama periode 2013 – 2021, *crime rate* tercatat menurun sebesar 15,02 persen (atau dari 273 pada tahun 2013 menjadi 232 pada tahun 2021). Hal ini sekaligus menempatkan Papua Barat menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan tindak kejahatan paling tinggi di Indonesia.

Berikutnya, statistik keamanan dengan pendekatan kewilayahan dicerminkan dari data jumlah perkelahian massal yang terjadi di wilayah desa/kelurahan. Data Podes mencatat persentase desa/kelurahan di Provinsi Papua Barat yang pernah mengalami konflik massal cenderung meningkat selama periode 2019 – 2021. Pada tahun 2019, persentasenya tercatat sebesar 3,22 persen. Selanjutnya pada tahun 2021, persentase desa/kelurahan dengan perkelahian massal turun menjadi 3,77 persen. Kedua pendekatan dalam statistik kriminal tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan di bidang keamanan di Provinsi Papua Barat.

Daftar Isi

| | |
|---|----------|
| Tim Penyusun..... | v |
| Kata Pengantar..... | v |
| Ringkasan Eksekutif..... | vii |
| Daftar Isi..... | ix |
| Daftar Gambar..... | xi |
| Daftar Tabel Lampiran..... | xiii |
| Pendahuluan..... | 3 |
| Latar Belakang..... | 3 |
| Tujuan..... | 5 |
| Ruang Lingkup..... | 6 |
| Sistematika Penyajian..... | 8 |
| Kejadian Kejahatan..... | 9 |
| Angka Kejahatan secara umum di Papua Barat..... | 9 |
| Angka Kejahatan secara nasional..... | 14 |
| Angka Kejahatan berdasarkan klasifikasi..... | 14 |
| Konflik Massal..... | 21 |
| Penyelesaian Tindak Kejahatan..... | 24 |
| Upaya Menjaga Keamanan..... | 25 |
| Daftar Pustaka..... | 28 |
| Catatan Teknis..... | 29 |
| Lampiran..... | 37 |

Daftar Gambar

| | |
|--|----|
| Gambar 1. <i>Crime Total</i> dan <i>Crime Rate</i> Provinsi Papua Barat, 2013-2021 | 11 |
| Gambar 2. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan menurut Kabupaten/Kota, 2021 | 13 |
| Gambar 3. Persentase Kejahatan yang Dapat Diselesaikan oleh Kepolisian menurut Kabupaten/Kota, 2021 | 13 |
| Gambar 4. Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang di Papua Barat, 2021 | 19 |
| Gambar 5. Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Mengalami Perkelahian Massal di Provinsi Papua Barat, 2018-2021..... | 22 |
| Gambar 6. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Mengalami Perkelahian Massal menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021 | 23 |
| Gambar 7. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Inisiator Penyelesaian Konflik Massal di Provinsi Papua Barat, 2021 | 25 |
| Gambar 8. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2021..... | 26 |

Daftar Tabel Lampiran

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana (<i>Crime Total</i>) di Papua Barat, | 37 |
| Tabel 2. Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan di Papua Barat Tahun 2018 - 2021 | 38 |
| Tabel 3. Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>) di Papua Barat Tahun 2018 - 2021 | 39 |
| Tabel 4. Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Provinsi Papua Barat, 2021 | 40 |
| Tabel 5. Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Fakfak, 2021 | 41 |
| Tabel 6. Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Kaimana, 2021 | 42 |
| Tabel 7. Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Teluk Wondama, 2021 | 43 |
| Tabel 8. Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Teluk Bintuni, 2021 | 44 |
| Tabel 9. Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Manokwari, 2021 | 45 |

| | |
|--|----|
| Tabel 10. Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Sorong Selatan, 2021..... | 46 |
| Tabel 11. Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Sorong, 2021 | 47 |
| Tabel 12. Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Raja Ampat, 2021 | 48 |
| Tabel 13. Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Maybrat, 2021..... | 49 |
| Tabel 14. Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Manokwari Selatan, 2021..... | 50 |
| Tabel 15. Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kota Sorong, 2021.... | 51 |
| Tabel 16. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Perkelahian Massal di Wilayahnya di Papua Barat, 2021 | 52 |
| Tabel 17. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dan Kabupaten/Kota, 2021 | 53 |
| Tabel 18. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat, 2018 | 54 |

INDIKATOR KUNCI STATISTIK KRIMINAL PROVINSI PAPUA BARAT, 2021

Tren *Crime Total* dan *Crime Rate* Provinsi Papua Barat, 2012-2021



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Polda Papua Barat

Jumlah Kejadian Kejahatan (Lapor dan Selesai) Tahun 2021



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Polda Papua Barat

Pendahuluan

Latar Belakang

Kebutuhan dasar setiap manusia bukan hanya terbatas pada kebutuhan fisik/biologis, namun juga mencakup kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri, dan rasa aman. Saat ini kebutuhan akan rasa aman menjadi kebutuhan fundamental dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Menurut Abraham Maslow (1943) dalam teori hierarki kebutuhan manusia, rasa aman berada pada tingkatan yang kedua setelah kebutuhan dasar manusia (sandang, pangan, papan). Hal ini menegaskan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan dasar manusia yang penting.

Negara secara eksplisit menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan rasa aman. Hal ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, "... Pemerintah dan Negara Indonesia melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," Penegasan bahwa rasa aman adalah salah satu hak asasi manusia juga tertuang dalam Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau

tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Selain itu, di dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Walaupun negara dan pemerintah sudah melindungi dan menjamin keamanan bagi setiap warga negara, tetapi hal tersebut tidak serta merta dapat berdampak langsung dalam memberikan rasa aman bagi warga dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tercermin dari kejadian kriminal yang marak terjadi di masyarakat. Sementara itu, perkembangan tingkat kriminal itu sendiri sangatlah sulit untuk diukur. Statistik dan indikator yang disajikan pun merupakan indikator negatif, seperti misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*). Semakin tinggi angka kriminalitas/jumlah kejahatan di suatu wilayah mengindikasikan semakin rendahnya kondisi keamanan di wilayah tersebut.

Upaya memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan bagian integral dari proses pembangunan. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan di masyarakat akan membangun suasana kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang

merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Tahun 2021 merupakan tahun yang berat akibat adanya Pandemi Covid-19. Pada Juli 2021 varian baru Covid-19 menyebar ke seluruh wilayah Papua Barat. Tren peningkatan kasus berdampak luas tidak hanya pada sektor ekonomi, namun juga sektor-sektor esensial lainnya. Akibatnya, angka pengangguran dan kemiskinan pun tercatat mulai merangkak naik. Dengan penyusunan publikasi Statistik Kriminal tahun 2021 ini dapat diperoleh gambaran umum mengenai kondisi keamanan di Papua Barat selama 2021 terlebih lagi pada situasi Pandemi Covid-19. Selanjutnya diharapkan bahwa publikasi ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk mewujudkan keamanan bagi semua.

Tujuan

Penulisan publikasi Statistik Kriminal 2021 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik kriminal secara berkala dan berkesinambungan. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Secara umum, tujuan penyusunan publikasi ini adalah dalam rangka memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan terkini masyarakat di Provinsi Papua Barat serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, penyusunan publikasi ini juga menguraikan tentang jenis kejahatan serta kejadian perkelahian massal yang terjadi, untuk memperkaya data dan informasi mengenai kondisi keamanan di Provinsi Papua Barat.

Ruang Lingkup

Publikasi Statistik Kriminal Provinsi Papua Barat ini menyajikan data dan informasi tentang kejadian kejahatan yang terjadi di Provinsi Papua Barat dan juga tingkat kabupaten/kota, khususnya yang terjadi pada tahun 2021. Selain itu, untuk memperoleh gambaran perkembangan antar tahun, tren perkembangan beberapa karakteristik juga disajikan dalam publikasi ini. Variabel tersebut meliputi jumlah tindakan pidana dan jumlah penyelesaian kejahatan.

Sumber data utama publikasi ini diperoleh dari Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat. Selain itu, data jumlah kejahatan menurut jenisnya juga dikumpulkan dari seluruh Polres/Polresta yang tersebar di kabupaten/kota di seluruh Papua Barat. Sebagai catatan, total agregasi jenis kejahatan di Papua Barat bisa berbeda antara data dari Polda dan total agregasi dari kabupaten/kota.

Satu hal yang menjadi kendala adalah data belum tersedia dengan baik pada kabupaten-kabupaten pemekaran karena Polres masih tergabung dengan kabupaten induknya. Polres pada kabupaten induk juga belum mampu memilah data tindak pidana antara kabupaten induk dan kabupaten pemekarannya, sehingga statistik dan indikator yang disajikan dalam publikasi ini hanya mencakup sebelas kabupaten/kota di Papua Barat, yaitu Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, Maybrat, Manokwari Selatan, dan Kota Sorong. Khusus Manokwari Selatan, kabupaten ini merupakan pemekaran Kabupaten Manokwari, namun Polresnya sudah dibangun dan aktif dalam melakukan pelayanan, sehingga data keamanan untuk kabupaten ini sudah bisa diperoleh. Sementara untuk Kabupaten Maybrat, data keamanan dapat diperoleh dari Polsek setempat. Sedangkan untuk kabupaten Tambrau dan Pegunungan Arfak datanya tidak tersedia. Oleh karena itu, statistik keamanan pada kedua kabupaten tersebut belum dapat ditampilkan dalam publikasi ini.

Sementara itu, khusus data konflik massal, satu-satunya sumber data yang digunakan berasal dari kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa atau yang dikenal dengan kegiatan *Updating Potensi Desa (Podes) 2021*.

Sistematika Penyajian

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam dua bagian (Bab) yang disusun secara sistematis. Bab I menjelaskan latar belakang dan tujuan penulisan publikasi. Bab II menyajikan gambaran umum kejadian kejahatan yang bersumber dari data Polda/Polres/Polresta, termasuk juga kejadian konflik massal yang bersumber data dari Podes 2021. Di bagian akhir publikasi juga dilengkapi dengan catatan teknis yang menjelaskan metodologi, konsep dan definisi, serta penjelasan mengenai statistik/indikator yang digunakan dalam publikasi ini. Selanjutnya, daftar pustaka dan tabel lampiran disajikan pada bagian paling akhir dari publikasi ini.

Kejadian Kejahatan

Angka Kejahatan secara umum di Papua Barat

Indikator pertama yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kejahatan di suatu wilayah adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*). Meski demikian perlu kehati-hatian dalam memaknai angka kejahatan secara umum karena merupakan aritmatika sederhana yang menggabungkan semua jenis kejahatan dalam penghitungan tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya (Savitz, 1978).

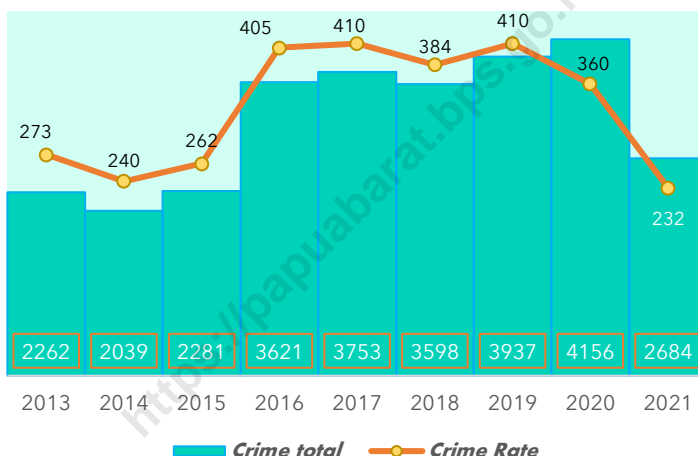
Gambar 1 di bawah ini menyajikan tren jumlah kejahatan (*crime total*) di Papua Barat dari 2013 hingga 2021. Selama periode tersebut umumnya perkembangan jumlah kejahatan di Provinsi Papua Barat menunjukkan tren fluktuatif dan terjadi penurunan tajam pada tahun 2021. Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat mencatat bahwa dalam kurun waktu 9 tahun terakhir (2013 – 2021), laju peningkatan tindak pidana di Papua Barat meningkat 19 persen. Pada tahun 2013 jumlah kriminalitas di Provinsi Papua Barat tercatat sebanyak 2.262 kasus. Sementara itu, pada tahun 2021 jumlahnya meningkat signifikan menjadi 2.684 kasus.

Sejalan dengan indikator jumlah kejahatan di atas, tingkat kejahatan (*crime rate*) di Papua Barat umumnya juga meningkat. *Crime rate* merupakan sebuah indikator yang mencerminkan risiko penduduk terkena tindak kejahatan. Dengan kata lain, indikator ini menunjukkan tingkat kerawanan kejahatan suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Semakin tinggi angka *crime rate* maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula, dan sebaliknya.

Pada tahun 2013 tercatat sebesar 273, kemudian pada tahun 2016 meningkat signifikan menjadi 405. Hal ini berarti tingkat risiko penduduk menjadi korban kejahatan di Papua Barat semakin meningkat. Jika dibandingkan dengan angka nasional, tingkat risiko kejahatan pada tahun 2017 hingga 2019 tercatat pada kisaran nilai 115. Risiko ini hampir empat kali lebih rendah dibanding risiko kejahatan yang terjadi di Papua Barat. Statistik ini sekaligus memberikan informasi perlunya kebijakan-kebijakan di bidang keamanan yang dapat menekan risiko kejahatan yang dialami penduduk di Provinsi Papua Barat.

Hal unik yang terjadi pada tahun 2021 adalah jumlah kejahatan dan *crime rate* sama-sama turun tajam bahkan lebih rendah daripada tahun 2016. Memaknai statistik keamanan tidak cukup dari satu sisi, melainkan juga harus diperkaya dari indikator terkait lainnya. Apalagi tahun 2021 adalah tahun dimana Pandemi Covid-19 kembali menjadi

ganjalan dalam pembangunan di berbagai sektor, khususnya di bidang keamanan. Pandemi Covid-19 yang tidak kunjung reda masih memberi pengaruh pada keamanan di Provinsi Papua Barat. Gambaran total kejahatan dan tingkat kejahatan di Papua Barat dari tahun 2013 hingga 2021 disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Polda Papua Barat

Gambar 1. Crime Total dan Crime Rate Provinsi Papua Barat, 2013-2021

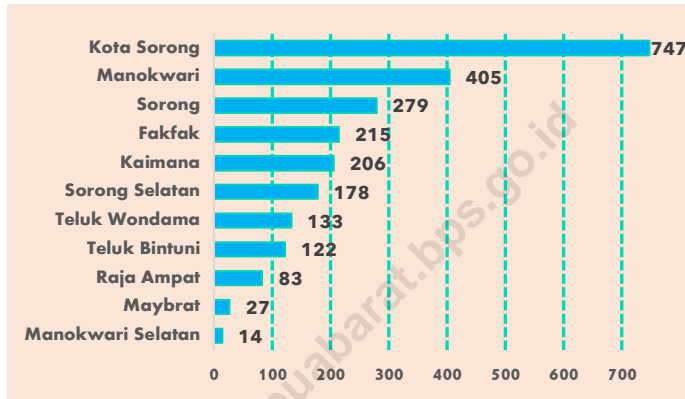
Selanjutnya jika dirinci menurut kabupaten/kota, umumnya jumlah tindak pidana sebanding dengan jumlah penduduknya. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula tindak kejahatan yang terjadi. Hal ini terlihat dari jumlah kejahatan yang terjadi pada tahun 2021. Total kejahatan yang dilaporkan ke Polres Manokwari tercatat sebanyak 405. Hal ini sebanding dengan jumlah penduduk kabupaten ini

yang menempati terbesar kedua setelah Kota Sorong. Sementara itu, di Kota Sorong *crime total* tercatat paling tinggi di Provinsi Papua Barat yaitu sebanyak 747 kasus. Di sisi lain, kriminalitas paling rendah terjadi di Kabupaten Manokwari Selatan yaitu sebanyak 14 kasus.

Perlu kehati-hatian dalam memaknai statistik di atas. Hal ini karena jumlah tindak pidana yang terjadi di suatu wilayah kabupaten/kota dihitung melalui pendekatan **pelaporan** dan kasus yang ditangani kantor kepolisian setempat. Untuk kasus-kasus pidana dimana aparat kepolisian tidak hadir untuk menangani perkara maupun penduduk yang tidak melaporkan tindak kejahatan, maka jumlah kasusnya pun cenderung tidak tercakup. Inilah salah satu kelemahan dalam penyajian data statistik keamanan, karena seringkali data yang ditampilkan tidak merepresentasikan kondisi sebenarnya di lapangan. Namun di atas itu semua, data yang diperoleh dari kepolisian tetap dapat dijadikan rujukan dalam mengevaluasi serta merencanakan pembangunan dalam bidang keamanan.

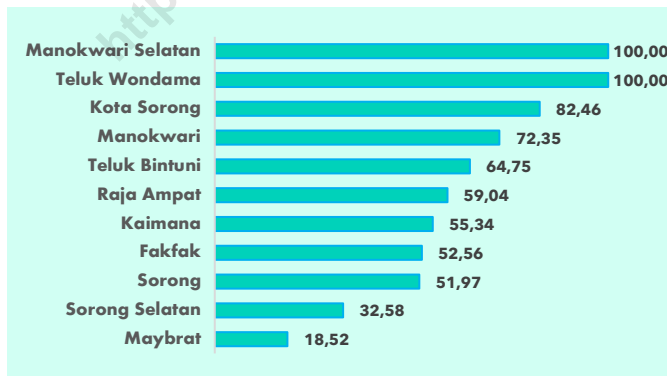
Sementara itu, jika ditinjau dari persentase kasus yang dapat diselesaikan, Kabupaten Manokwari Selatan dan Teluk Wondama menempati urutan pertama dengan persentase penyelesaian kasus 100 persen. Menyusul berikutnya adalah Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong yang memiliki *clearance rate* masing-masing sebesar 72,35

persen dan 82,46 persen. Di sisi lain masih terdapat tujuh kabupaten dimana *clearance rate* masih di bawah 60 dengan persentase terkecil adalah Kabupaten Maybrat dengan persentase sebesar 18,52 persen.



Sumber: Polres/Polresta se-Papua Barat

Gambar 2. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan menurut Kabupaten/Kota, 2021



Sumber: Polres/Polresta se-Papua Barat

Gambar 3. Persentase Kejahatan yang Dapat Diselesaikan oleh Kepolisian menurut Kabupaten/Kota, 2021

Angka Kejahatan secara Nasional

Tingkat risiko kejadian kejahatan di suatu wilayah tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah kejahatan yang dilaporkan. Berdasarkan Publikasi Statistik Kriminal 2021 (BPS, 2021) yang menyajikan data statistik keamanan secara nasional dari seluruh provinsi di Indonesia, diketahui bahwa Papua Barat menempati urutan ke-25 jumlah tindak kejahatan diantara provinsi-provinsi lainnya. Dengan kata lain, jumlah tindak kejahatan di Papua Barat tergolong rendah. Namun demikian, ternyata tingkat risiko terkena kejahatan di Papua Barat justru menempati urutan pertama tertinggi di Indonesia dengan crime rate sebesar 328 pada tahun 2020. Sementara itu, Provinsi DKI Jakarta tercatat memiliki tingkat risiko sebesar 105. Artinya, penduduk Papua Barat tiga kali lipat lebih rawan menjadi korban kejahatan dibanding penduduk DKI Jakarta.

Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi

Jumlah kejahatan (*crime total*) dan tingkat risiko terkena kejahatan (*crime rate*) hanya menggambarkan peristiwa kejahatan secara umum. Angka kejahatan tersebut dapat lebih bermanfaat khususnya dalam menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan tingkat kerawanan suatu wilayah apabila dilihat secara

lebih detail. Publikasi ini mengelompokkan jenis kejahatan berdasarkan beberapa kriteria, yakni:

1. Target dari kejadian kejahatan (orang, harta benda, ketertiban umum, negara, dan sebagainya).
2. Tingkat keseriusan kejahatan (kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap hak milik/barang, dan sebagainya).
3. Bagaimana kejahatan tersebut dilakukan (kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan, kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan, dan sebagainya).

Hal ini secara umum sejalan dengan pengelompokan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia dan *The International Classification of Crime for Statistical Purposes* (ICCS) yang digagas Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNODC (*United Nation Office on Drugs and Crime*) (UNODC, 2015).

Berikut klasifikasi kejahatan yang terdapat di dalam publikasi ini:

| No | Klasifikasi Kejahatan | Jenis Kejahatan |
|----|---------------------------------|--------------------|
| 1 | Kejahatan terhadap Nyawa | Pembunuhan |
| 2 | Kejahatan terhadap Fisik/ Badan | Penganiayaan Berat |

| No | Klasifikasi Kejahatan | Jenis Kejahatan |
|----|---|--|
| | | Penganiayaan Ringan |
| | | Kekerasan dalam Rumah Tangga |
| 3 | Kejahatan terhadap Kesusilaan | Perkosaan |
| | | Pencabulan |
| 4 | Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang | Penculikan |
| | | Mempekerjakan Anak Dibawah Umur |
| 5 | Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan | Pencurian dengan Kekerasan |
| | | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi) |
| | | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam) |
| 6 | Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang | Pencurian |
| | | Pencurian dengan pemberatan |
| | | Pencurian Kendaraan Bermotor |
| | | Pengrusakan/Penghancuran Barang |
| | | Pembakaran dengan Sengaja |
| | | Penadahan |
| 7 | Kejahatan Terkait Narkotika | Narkotika dan Psicotropika |
| 8 | Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi | Penipuan/Perbuatan Curang |
| | | Penggelapan |

| No | Klasifikasi Kejahatan | Jenis Kejahatan |
|----|------------------------------------|--------------------------|
| | | Korupsi |
| 9 | Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum | Terhadap Ketertiban Umum |

Pertama, Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan) merupakan salah satu kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional, selain itu juga merupakan kejahatan yang paling berat hukumannya dalam KUHP Indonesia. Jumlah kejadian tidak mencerminkan jumlah korban karena pada satu kejadian bisa jadi lebih dari satu orang. Berdasarkan catatan Polda Papua Barat, selama tahun 2021 terjadi 3 kejadian pembunuhan di Papua Barat.

Selanjutnya, kejahatan terhadap fisik termasuk di dalamnya adalah penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk kejadian kejahatan terhadap fisik/badan (*violence*) pada 2021 secara total terjadi sebanyak 70 kejadian, dimana mayoritas merupakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (55 kejadian). Sementara itu, penganiayaan berat dan penganiayaan ringan tercatat masing-masing sebesar 10 dan 5 kejadian.

Ketiga, kejahatan terhadap kesusilaan terdiri dari jenis kejahatan perkosaan dan pencabulan. Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan (perkosaan dan pencabulan) di Papua Barat tercatat sebanyak

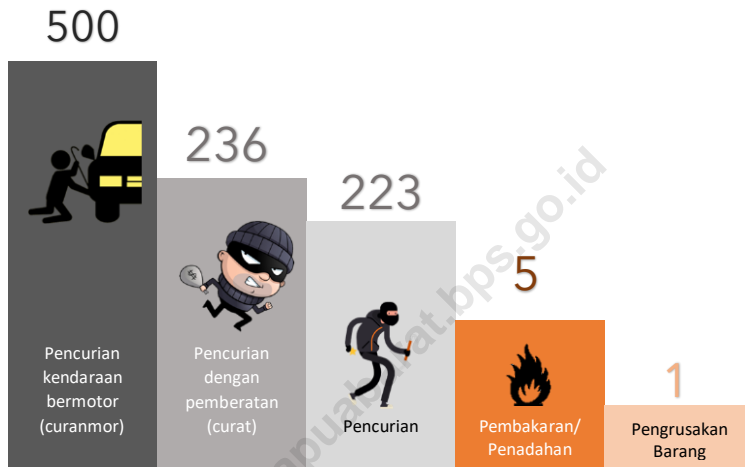
20 kasus, yakni perkosaan sebanyak 20 kejadian dan tidak ada kejadian pencabulan.

Keempat, klasifikasi kejahatan terhadap kemerdekaan orang terdiri dari jenis kejahatan penculikan dan mempekerjakan anak di bawah umur. Jumlah kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang tahun 2021 hanya ada mempekerjakan anak di bawah umur sebanyak 110 kejadian.

Kelima, kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan. Jenis kejahatan ini secara hierarki tergolong tinggi karena selain menyangkut kejahatan terhadap properti juga merupakan kejahatan terhadap fisik. Yang termasuk dalam kejahatan ini adalah adalah Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi), dan Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam). Berdasarkan catatan Polda Papua Barat, pada tahun 2021 terjadi sebanyak 113 kejadian yaitu pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan senjata tajam.

Kelompok kejahatan berikutnya adalah kejahatan terhadap hak milik/barang. Kejadian kejahatan pencurian tanpa penggunaan kekerasan merupakan jenis kejahatan yang paling banyak jumlahnya setiap tahunnya. Kejahatan ini banyak didominasi oleh kejahatan

pencurian kendaraan bermotor dengan jumlah kasus sebanyak 500 kejadian.



Sumber: Polres/Polresta se-Papua Barat

Gambar 4. Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang di Papua Barat, 2021

Kelompok kejahatan ketujuh adalah kejahatan terkait narkoba. Kejahatan terkait narkoba termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Pada tahun 2021, jumlah kejahatan narkoba yang ditangani Polda Papua Barat tercatat ada sebanyak 120 kasus. Sementara itu, berdasarkan laporan dari Kepolisian Resor di kabupaten, Kabupaten Tambraw tercatat memiliki kejahatan terkait narkoba paling tinggi se-Papua Barat yaitu sebanyak 22 kasus.

Ketujuh, kelompok kejahatan terkait penipuan, penggelapan dan korupsi. Kejahatan ini mencakup kejahatan penipuan/perbuatan curang, penggelapan, dan korupsi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polda Papua Barat, kejahatan penipuan/perbuatan curang mendominasi kelompok kejahatan ini. Pada tahun 2021 jenis kejahatan tersebut tercatat sebanyak 96 kejadian. Sementara itu untuk kejahatan penggelapan dan korupsi tercatat masing-masing sebanyak 89 dan 9 kasus kejahatan.

Kelompok kejahatan terakhir adalah jenis kejahatan terhadap ketertiban umum. Secara umum kejahatan jenis ini dapat diartikan sebagai kejahatan yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban di dalam lingkungan masyarakat. Contoh kongkrit kejahatan terhadap ketertiban umum sebagaimana diatur dalam KUHP diantaranya adalah penodaan terhadap bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, dan lambang negara; menyatakan permusuhan terhadap pemerintah; menyatakan perasaan permusuhan terhadap golongan tertentu; menghasut di muka umum yang menimbulkan kekacauan. Polda Papua Barat mencatat tidak ada kejadian kejahatan terkait ketertiban umum sepanjang tahun 2021. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jenis kejahatan ini turun drastis dari 321 menjadi 0 kejadian.

Konflik Massal

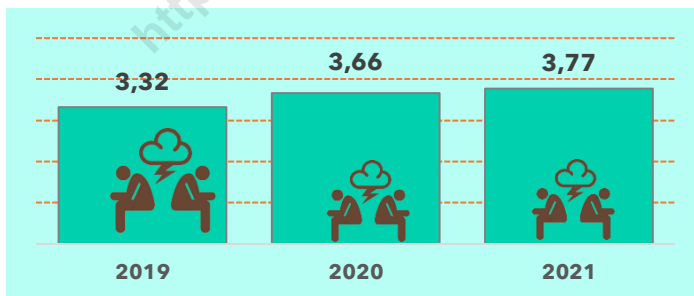
Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai fenomena konflik berupa perkelahian massal yang terjadi di Provinsi Papua Barat pada tahun 2021. Aspek yang dilihat meliputi kejadian perkelahian massal di kabupaten/kota serta upaya penyelesaiannya. Selain dapat dikategorikan sebagai kejahatan, perkelahian massal dianggap sebagai suatu kondisi yang dapat mengganggu keamanan.

Secara etimologi konflik berasal dari kata kerja Latin "*configere*" yang berarti saling memukul (Hafidhuddin, 2001). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percekocokan, perselisihan, pertentangan. Secara terminologi, Soekanto (2005) mendefinisikan pertentangan atau pertikaian (konflik) adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan. Konflik yang ekstrim akan berujung pada kekerasan dan menimbulkan perkelahian massal.

Data yang menjadi sumber utama merupakan data kewilayahan (*spatial data*) yang diperoleh dari data Statistik Potensi Desa (Podes). Unit observasi dalam pengumpulan data statistik Podes adalah seluruh desa/kelurahan di wilayah Indonesia. Sejalan dengan itu, kajian mengenai perkelahian massal pada bagian ini secara umum akan dilihat

dari cakupan jumlah atau persentase desa/kelurahan yang menjadi ajang atau lokasi kejadian tersebut.

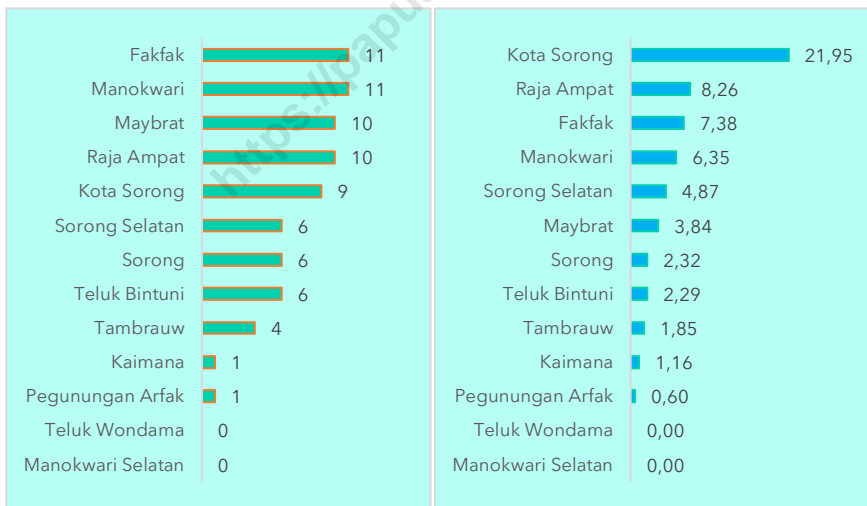
Seperti yang disajikan pada Gambar 5 berikut, hasil Podes 2019, 2020, dan 2021 memperlihatkan bahwa jumlah desa/kelurahan yang mengalami perkelahian massal mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2019, desa dengan konflik massal di Papua Barat ada sebanyak 66 desa atau sekitar 3,32 persen dari total desa di provinsi ini. Berikutnya pada tahun 2020 naik menjadi 60 (atau sekitar 3,66 persen) desa/kelurahan yang mengalami perkelahian massal. Sementara hasil Podes 2021 menunjukkan bahwa terjadi sedikit kenaikan jumlah desa/kelurahan dengan konflik massal, yaitu sebanyak 75 desa/kelurahan atau sekitar 3,77 persen dari total desa di Papua Barat.



Sumber: BPS, Pendataan Podes 2019, 2020, 2021

Gambar 5. Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Mengalami Perkelahian Massal di Provinsi Papua Barat, 2019-2021

Apabila kita melihat lebih rinci ke kabupaten/kota, kita dapat melihat variasi jumlah kejadian perkelahian massal. Selama tahun 2021, Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Manokwari merupakan kabupaten dengan jumlah desa/kelurahan dengan perkelahian massal tertinggi di Papua Barat, yaitu masing-masing sebanyak 11 desa/kelurahan. Sebaliknya, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Manokwari Selatan merupakan kabupaten dimana desa/kelurahannya tidak pernah terjadi konflik massal sepanjang tahun 2021. Selanjutnya, jika dilihat dari persentasenya, Kota Sorong tercatat sebagai kota dengan persentase tertinggi desa/kelurahan yang pernah terjadi perkelahian massal.



Sumber: BPS, Pendataan Podes 2021

Gambar 6. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Mengalami Perkelahian Massal menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2021

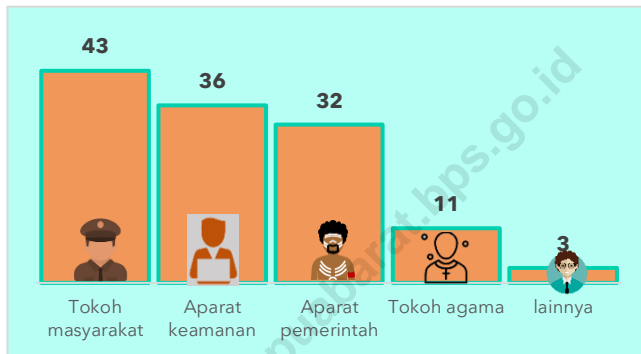
Penyelesaian Tindak Kejahatan

Pemerintah menyadari kerawanan konflik di Indonesia dapat menciptakan perpecahan. Oleh karena itu, sebagai upaya menanggulangi isu konflik pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No. 7 Tahun 2013 tentang penanganan konflik sosial. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa pemerintah berperan aktif dalam setiap penyelesaian segala bentuk konflik atau benturan fisik dan kekerasan lainnya yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial yang mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Gurr dalam Soetopo (2001) menjelaskan bahwa strategi yang dipandang lebih efektif dalam pengelolaan konflik meliputi: (1) konsistensi damai, yaitu mengendalikan konflik dengan cara tidak saling mengganggu dan saling merugikan, dengan menetapkan peraturan yang mengacu pada perdamaian serta diterapkan secara ketat dan konsekuen; (2) dengan mediasi (perantara). Jika konflik menemui jalan buntu, masing-masing bisa menunjuk pada pihak ketiga untuk menjadi perantara yang berperan secara jujur dan adil serta tidak memihak.

Gambar 7 berikut memetakan inisiator yang aktif dalam menyelesaikan konflik massal. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa inisiator penyelesaian konflik paling banyak berasal dari tokoh masyarakat (43 desa/kelurahan). Selanjutnya adalah aparat keamanan

sebanyak 36 desa/kelurahan dan aparat pemerintah sebanyak 32 desa/kelurahan. Sementara itu, tokoh agama juga memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik, ada sebanyak 25 desa/kelurahan dimana perkelahian massal dapat diselesaikan oleh tokoh agama.

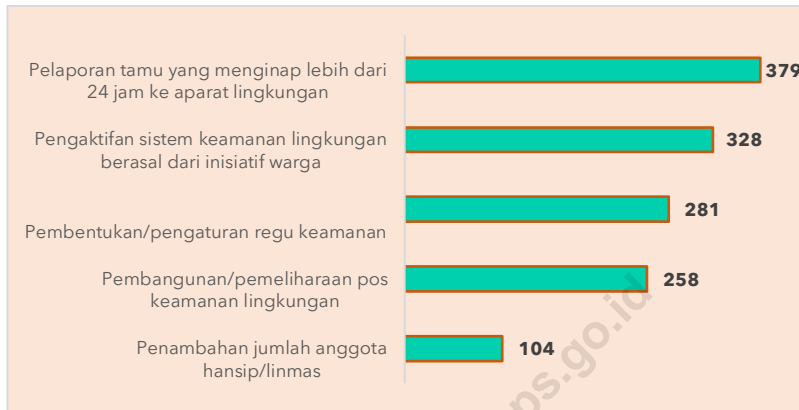


Sumber: BPS, Pendataan Podas 2021

Gambar 7. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Inisiator Penyelesaian Konflik Massal di Provinsi Papua Barat, 2021

Upaya Menjaga Keamanan

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai upaya dan partisipasi masyarakat yang dilakukan untuk menjaga keamanan di lingkungan desa/kelurahan tempat tinggalnya dan perkembangannya selama satu dekade terakhir. Data yang digunakan merupakan data kewilayahan (*spatial data*) dengan unit observasi seluruh desa/kelurahan yang ada di wilayah Papua Barat (pendataan Potensi Desa).



Sumber: BPS, Pendataan Podes 2021

Gambar 8. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2021

Gambar 8 di atas menyajikan banyaknya desa/kelurahan menurut jenis upaya yang dilakukan warganya untuk menjaga keamanan lingkungan. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa upaya yang paling banyak dilakukan oleh warga desa untuk menjaga keamanan selama tahun 2021 secara berturut-turut adalah melakukan pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan (379), pengaktifan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga (328), pembentukan/pengaturan regu keamanan (281), pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan (258), dan penambahan jumlah anggota hansip/linmas (104).

Gambaran upaya dan partisipasi masyarakat desa dalam menjaga keamanan dirinci menurut kabupaten/kota selama tahun 2021 disajikan pada tabel lampiran. Dari tabel-tabel tersebut terlihat bahwa upaya warga untuk menjaga keamanan dengan menerapkan sistem pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan mendominasi hampir di semua kabupaten/kota di Papua Barat. Sementara itu, upaya menjaga keamanan dengan penambahan jumlah anggota hansip/linmas menjadi upaya yang paling sedikit dilakukan di hampir semua kabupaten/kota.

Selain dari aspek warga, upaya menjaga keamanan dan ketertiban juga merupakan fungsi dari aparat berwenang dalam hal ini adalah polisi. Data Podes menyajikan Desa/kelurahan yang pada wilayahnya terdapat keberadaan pos polisi. Berdasarkan Pendataan Podes tahun 2018, di Provinsi Papua Barat hanya terdapat 113 desa/kelurahan atau setara dengan 5,69 persen dari keseluruhan desa/kelurahan di Papua Barat yang di wilayahnya terdapat keberadaan pos polisi (termasuk Polsek, Polres, dan Polda). Artinya, sekitar 94,31 persen desa/kelurahan tidak ada pos polisi. Bahkan, sekitar 56,77 persen diantaranya menyatakan akses ke pos polisi terdekat cenderung sulit dan sangat sulit.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Kriminal 2022. Jakarta: BPS.
- Hafidhuddin, Didin. et.al. (2001). Berbangsa dan Bernegara Menurut Islam. Jakarta: Pustaka Zaman.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2012). Bandung: Citra Umbara.
- Maslow, A.H. (1943). *A Theory of Human Motivation*. New York: Psychological Review.
- Soetopo, H. (2001). Manajemen Konflik. Malang: Universitas Negeri Malang.
- UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28 Tentang Hak Asasi Manusia.
- United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC). (2015). International Classification Of Crimes For Statistical Purposes. Version 1.0.*

Catatan Teknis

Sumber Data

Data yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari dua sumber utama, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Data jumlah tindak pidana (*crime total*), jumlah kejadian kejahatan menurut jenis kejahatan, dan jumlah kasus yang diselesaikan bersumber dari Polda Papua Barat, Polres/Polresta se-Papua Barat.
2. Data pendukung lainnya yang meliputi jumlah desa dengan kejadian konflik massal diperoleh dari hasil kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (*Updating Podes*) tahun 2021.

Statistik Potensi Desa (Podes)

Potensi Desa (podes) merupakan satu-satunya data berbasis kewilayahan yang dihasilkan oleh BPS. Pendataan Podes dilakukan di seluruh wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan/Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT) di seluruh Indonesia. Awalnya, Pendataan Podes diselenggarakan setiap tiga tahun atau dua tahun sebelum pelaksanaan sensus. Namun sehubungan dengan semakin mendesaknya kebutuhan data Podes yang terkini, maka

sejak tahun 2019 Podes dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini disebut dengan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (*Updating Podes*).

Responden atau narasumber pendataan Podes adalah kepala desa/lurah atau aparat desa/kelurahan lainnya (seperti sekretaris desa, bendahara, pelaksana teknis dan unsur kewilayahan). Selain itu, narasumber Podes juga berasal dari unsur lainnya, diantaranya guru, pendeta, dokter, perawat, bidan, kader, dan petugas penyuluh pertanian yang tinggal di dalam wilayah desa/kelurahan serta mengetahui kondisi dan karakteristik di desa/kelurahan.

Awalnya, fungsi utama pendataan Podes adalah menyajikan data atau informasi tentang desa/kelurahan untuk memenuhi keperluan perencanaan kegiatan sensus. Namun peran data Podes semakin luas setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Data Podes menjadi data strategis yang digunakan tidak hanya sebagai bahan evaluasi, namun juga perencanaan pembangunan di desa.

Data dan informasi yang dikumpulkan dalam Podes mencakup data tentang jenis dan jumlah fasilitas umum yang ada di desa/kelurahan. Diantaranya adalah fasilitas sosial seperti posyandu, puskesmas, sekolah, masjid, gereja, dan tempat ibadat lainnya, serta sarana atau fasilitas olahraga. Berikutnya adalah fasilitas ekonomi seperti pasar, pertokoan, supermarket, KUD, sarana transportasi, bank, dan lembaga

keuangan/perkreditan lainnya. Selain itu, Pendataan Podes juga mencakup pengumpulan data tentang jenis dan jumlah kejadian-kejadian penting yang sedang atau pernah terjadi di desa, seperti jenis dan jumlah bencana alam, wabah penyakit, kejadian kejahatan, dan konflik massal baik antarwarga desa maupun antardesa.

Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, penjelasan mengenai konsep dan definisi pada bagian ini akan diuraikan di bawah ini.

Konsep-Konsep Kriminalitas dalam Data Polri

a. Peristiwa Kejahatan (Kriminalitas)/Pelanggaran

- 1. Tindak Kejahatan/Kriminalitas atau pelanggaran* merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
- 2. Peristiwa yang Dilaporkan* ialah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana

pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

3. *Peristiwa yang Diselesaikan oleh Kepolisian*, adalah:

- Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
- Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
- Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichtmatigheid*.
- Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi kepolisian.
- Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- Peristiwa yang telah kadaluarsa

b. *Pelaku Kejahatan*

Yang dimaksud *pelaku kejahatan* adalah:

- Orang yang melakukan kejahatan.
- Orang yang turut melakukan kejahatan.
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.

- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

c. *Tahanan*

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang dari 20 hari.

d. *Kerugian*

Kerugian adalah hilang, rusak, atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

e. *Korban*

Korban Kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

Konsep-Konsep Kejahatan dalam Podes

a. *Kejahatan/Kriminalitas*

Konsep dan definisi kejahatan yang digunakan dalam Podes pada dasarnya merujuk pada konsep kejahatan yang

digunakan oleh Polri maupun KUHP. Namun, karena konsep ini ditanyakan pada responden yang umumnya awam tentang hukum, pengertian tentang konsep kejahatan ini lebih didasarkan pada pengakuan, pemahaman, dan persepsi responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya. Sejalan dengan itu, jenis-jenis tindak kejahatan yang dicakup Podes lebih fokus pada jenis kejahatan yang dikenal masyarakat, misalnya perampokan untuk menggantikan konsep pencurian dengan kekerasan yang biasa digunakan Polri.

b. Konflik Massal

Konsep konflik massal yang digunakan dalam Podes merujuk pada konflik fisik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan yang meliputi:

Perkelahian antar kelompok masyarakat adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari.

Perkelahian warga antar desa/kelurahan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan warga desa/kelurahan/nagari lainnya.

Perkelahian warga dengan aparat keamanan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat keamanan.

Perkelahian warga dengan aparat pemerintah adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah.

Perkelahian antar pelajar/mahasiswa adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain.

Perkelahian antar suku/etnis adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/kelurahan/nagari.

Lainnya: perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar aparat keamanan, dan sebagainya.

Penjelasan Teknis

1. Angka Indeks Kejahatan (I_t)

$$I_t = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$$

Dimana:

t_0 = tahun dasar

t = tahun t

2. **Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (Crime Rate)**

Crime Rate =

$$= \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$

3. **Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (Crime Clearance)**

Crime Clearance =

$$= \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan}} \times 100$$

Lampiran

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana (*Crime Total*) di Papua Barat, 2019 - 2021

| Kabupaten/Kota | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Fakfak | 338 | 348 | 215 |
| Kaimana | 280 | 196 | 206 |
| Teluk Wondama | 102 | 46 | 133 |
| Teluk Bintuni | 110 | 82 | 122 |
| Manokwari | 759 | 707 | 405 |
| Sorong Selatan | 142 | 157 | 178 |
| Sorong | 281 | 293 | 279 |
| Raja Ampat | 71 | 84 | 83 |
| Maybrat | 15 | 6 | 27 |
| Manokwari Selatan | n.a | 22 | 14 |
| Kota Sorong | 1 061 | 384 | 747 |
| Papua Barat | 3 937 | 4 156 | 2 684 |

Sumber: Polda/Polres/Polresta Papua Barat

Tabel 2. Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan di Papua Barat, 2019 - 2021

| Kabupaten/Kota | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Fakfak | 177 | 162 | 113 |
| Kaimana | 218 | 165 | 114 |
| Teluk Wondama | 36 | 20 | 156 |
| Teluk Bintuni | 33 | 25 | 79 |
| Manokwari | 289 | 596 | 293 |
| Sorong Selatan | 52 | 61 | 58 |
| Sorong | 117 | 181 | 145 |
| Raja Ampat | 44 | 84 | 49 |
| Maybrat | 11 | 6 | 5 |
| Manokwari Selatan | n.a | 11 | 14 |
| Kota Sorong | 608 | 57 | 616 |
| Papua Barat | 2 555 | 1 260 | 2 626 |

Sumber: Polda/Polres/Polresta Papua Barat

Tabel 3. Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (*Clearence Rate*) di Papua Barat, 2019 - 2021

| Kabupaten/Kota | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Fakfak | 52,37 | 46,55 | 52,56 |
| Kaimana | 77,86 | 84,18 | 55,34 |
| Teluk Wondama | 35,29 | 43,48 | 100,00 |
| Teluk Bintuni | 30,00 | 30,49 | 64,75 |
| Manokwari | 38,08 | 84,30 | 72,35 |
| Sorong Selatan | 36,62 | 38,85 | 32,58 |
| Sorong | 41,64 | 61,77 | 51,97 |
| Raja Ampat | 61,97 | 100,00 | 59,04 |
| Maybrat | 73,33 | 100,00 | 18,52 |
| Manokwari Selatan | n.a | 50,00 | 100,00 |
| Kota Sorong | 57,30 | 14,84 | 82,46 |
| Papua Barat | 64,90 | 30,32 | 97,83 |

Sumber: Polda/Polres/Polresta Papua Barat

Tabel 4. Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Provinsi Papua Barat, 2021

| No | Kelompok Kejahatan | Jumlah Tindak Kejahatan |
|--|--|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Kejahatan terhadap Nyawa | | |
| 1 | Pembunuhan | 3 |
| Kejahatan terhadap Fisik/Badan | | |
| 2 | Penganiayaan Ringan | 5 |
| 3 | Penganiayaan Berat | 10 |
| 4 | Kekerasan dalam Rumah Tangga | 55 |
| Kejahatan terhadap Kesusilaan | | |
| 5 | Perkosaan | 20 |
| 6 | Pencabulan | 0 |
| Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang | | |
| 7 | Penculikan | 0 |
| 8 | Mempekerjakan Anak Dibawah Umur | 110 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan | | |
| 9 | Pencurian dengan Kekerasan | 113 |
| 10 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi) | 0 |
| 11 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam) | 0 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang | | |
| 12 | Pencurian | 223 |
| 13 | Pencurian dengan pemberatan | 236 |
| 14 | Pencurian Kendaraan Bermotor | 500 |
| 15 | Pengrusakan/Penghancuran Barang | 1 |
| 16 | Pembakaran dengan Sengaja | 5 |
| 17 | Penadahan | 3 |
| Kejahatan Terkait Narkotika | | |
| 18 | Narkotika dan Psikotropika | 120 |
| Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi | | |
| 19 | Penipuan/Perbuatan Curang | 217 |
| 20 | Penggelapan | 89 |
| 21 | Korupsi | 9 |
| Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum | | |
| 22 | Terhadap Ketertiban Umum | 0 |

Sumber: Polda Papua Barat

Tabel 5. Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Fakfak, 2021

| No | Kelompok Kejahatan | Jumlah Tindak Kejahatan |
|--|--|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Kejahatan terhadap Nyawa | | |
| 1 | Pembunuhan | 0 |
| Kejahatan terhadap Fisik/Badan | | |
| 2 | Penganiayaan Ringan | 41 |
| 3 | Penganiayaan Berat | 0 |
| 4 | Kekerasan dalam Rumah Tangga | 11 |
| Kejahatan terhadap Kesusilaan | | |
| 5 | Perkosaan | 3 |
| 6 | Pencabulan | |
| Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang | | |
| 7 | Penculikan | 0 |
| 8 | Mempekerjakan Anak Dibawah Umur | 0 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan | | |
| 9 | Pencurian dengan Kekerasan | 0 |
| 10 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi) | 0 |
| 11 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam) | 0 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang | | |
| 12 | Pencurian | 25 |
| 13 | Pencurian dengan pemberatan | 0 |
| 14 | Pencurian Kendaraan Bermotor | 4 |
| 15 | Pengrusakan/Penghancuran Barang | 9 |
| 16 | Pembakaran dengan Sengaja | 0 |
| 17 | Penadahan | 0 |
| Kejahatan Terkait Narkotika | | |
| 18 | Narkotika dan Psikotropika | 0 |
| Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi | | |
| 19 | Penipuan/Perbuatan Curang | 12 |
| 20 | Penggelapan | 4 |
| 21 | Korupsi | 1 |
| Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum | | |
| 22 | Terhadap Ketertiban Umum | 0 |

Sumber: Polda/Polres/Polresta Papua Barat

Tabel 6. Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Kaimana, 2021

| No | Kelompok Kejahatan | Jumlah Tindak Kejahatan |
|--|--|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Kejahatan terhadap Nyawa | | |
| 1 | Pembunuhan | 0 |
| Kejahatan terhadap Fisik/Badan | | |
| 2 | Penganiayaan Ringan | 46 |
| 3 | Penganiayaan Berat | 3 |
| 4 | Kekerasan dalam Rumah Tangga | 8 |
| Kejahatan terhadap Kesusilaan | | |
| 5 | Perkosaan | 3 |
| 6 | Pencabulan | 8 |
| Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang | | |
| 7 | Penculikan | 0 |
| 8 | Mempekerjakan Anak Dibawah Umur | 0 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan | | |
| 9 | Pencurian dengan Kekerasan | 0 |
| 10 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi) | 0 |
| 11 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam) | 0 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang | | |
| 12 | Pencurian | 31 |
| 13 | Pencurian dengan pemberatan | 0 |
| 14 | Pencurian Kendaraan Bermotor | 6 |
| 15 | Pengrusakan/Penghancuran Barang | 6 |
| 16 | Pembakaran dengan Sengaja | 0 |
| 17 | Penadahan | 0 |
| Kejahatan Terkait Narkotika | | |
| 18 | Narkotika dan Psikotropika | 0 |
| Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi | | |
| 19 | Penipuan/Perbuatan Curang | 9 |
| 20 | Penggelapan | 7 |
| 21 | Korupsi | 0 |
| Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum | | |
| 22 | Terhadap Ketertiban Umum | 0 |

Sumber: Polda/Polres/Polresta Papua Barat

Tabel 7. Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Teluk Wondama, 2021

| No | Kelompok Kejahatan | Jumlah Tindak Kejahatan |
|--|--|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Kejahatan terhadap Nyawa | | |
| 1 | Pembunuhan | 0 |
| Kejahatan terhadap Fisik/Badan | | |
| 2 | Penganiayaan Ringan | 20 |
| 3 | Penganiayaan Berat | 1 |
| 4 | Kekerasan dalam Rumah Tangga | 0 |
| Kejahatan terhadap Kesusilaan | | |
| 5 | Perkosaan | 3 |
| 6 | Pencabulan | 3 |
| Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang | | |
| 7 | Penculikan | 0 |
| 8 | Mempekerjakan Anak Dibawah Umur | 0 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan | | |
| 9 | Pencurian dengan Kekerasan | 2 |
| 10 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi) | 0 |
| 11 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam) | 0 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang | | |
| 12 | Pencurian | 14 |
| 13 | Pencurian dengan pemberatan | 6 |
| 14 | Pencurian Kendaraan Bermotor | 7 |
| 15 | Pengrusakan/Penghancuran Barang | 5 |
| 16 | Pembakaran dengan Sengaja | 1 |
| 17 | Penadahan | 0 |
| Kejahatan Terkait Narkotika | | |
| 18 | Narkotika dan Psicotropika | 2 |
| Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi | | |
| 19 | Penipuan/Perbuatan Curang | 4 |
| 20 | Penggelapan | 3 |
| 21 | Korupsi | 1 |
| Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum | | |
| 22 | Terhadap Ketertiban Umum | 3 |

Sumber: Polda/Polres/Polresta Papua Barat

Tabel 8. Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Teluk Bintuni, 2021

| No | Kelompok Kejahatan | Jumlah Tindak Kejahatan |
|--|--|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Kejahatan terhadap Nyawa | | |
| 1 | Pembunuhan | 3 |
| Kejahatan terhadap Fisik/Badan | | |
| 2 | Penganiayaan Ringan | 28 |
| 3 | Penganiayaan Berat | 1 |
| 4 | Kekerasan dalam Rumah Tangga | 0 |
| Kejahatan terhadap Kesusilaan | | |
| 5 | Perkosaan | 1 |
| 6 | Pencabulan | 1 |
| Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang | | |
| 7 | Penculikan | 0 |
| 8 | Mempekerjakan Anak Dibawah Umur | 0 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan | | |
| 9 | Pencurian dengan Kekerasan | 0 |
| 10 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi) | 0 |
| 11 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam) | 0 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang | | |
| 12 | Pencurian | 35 |
| 13 | Pencurian dengan pemberatan | 0 |
| 14 | Pencurian Kendaraan Bermotor | 0 |
| 15 | Pengrusakan/Penghancuran Barang | 5 |
| 16 | Pembakaran dengan Sengaja | 0 |
| 17 | Penadahan | |
| Kejahatan Terkait Narkotika | | |
| 18 | Narkotika dan Psikotropika | 0 |
| Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi | | |
| 19 | Penipuan/Perbuatan Curang | 20 |
| 20 | Penggelapan | 1 |
| 21 | Korupsi | 0 |
| Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum | | |
| 22 | Terhadap Ketertiban Umum | 0 |

Sumber: Polda/Polres/Polresta Papua Barat

Tabel 9. Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Manokwari, 2021

| No | Kelompok Kejahatan | Jumlah Tindak Kejahatan |
|--|--|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Kejahatan terhadap Nyawa | | |
| 1 | Pembunuhan | 2 |
| Kejahatan terhadap Fisik/Badan | | |
| 2 | Penganiayaan Ringan | 80 |
| 3 | Penganiayaan Berat | 0 |
| 4 | Kekerasan dalam Rumah Tangga | 17 |
| Kejahatan terhadap Kesusilaan | | |
| 5 | Perkosaan | 1 |
| 6 | Pencabulan | 5 |
| Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang | | |
| 7 | Penculikan | 0 |
| 8 | Mempekerjakan Anak Dibawah Umur | 0 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan | | |
| 9 | Pencurian dengan Kekerasan | 53 |
| 10 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi) | 0 |
| 11 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam) | 0 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang | | |
| 12 | Pencurian | 0 |
| 13 | Pencurian dengan pemberatan | 83 |
| 14 | Pencurian Kendaraan Bermotor | 65 |
| 15 | Pengrusakan/Penghancuran Barang | 10 |
| 16 | Pembakaran dengan Sengaja | 0 |
| 17 | Penadahan | 0 |
| Kejahatan Terkait Narkotika | | |
| 18 | Narkotika dan Psikotropika | 19 |
| Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi | | |
| 19 | Penipuan/Perbuatan Curang | 61 |
| 20 | Penggelapan | 8 |
| 21 | Korupsi | 1 |
| Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum | | |
| 22 | Terhadap Ketertiban Umum | 0 |

Sumber: Polda/Polres/Polresta Papua Barat

Tabel 10. Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Sorong Selatan, 2021

| No | Kelompok Kejahatan | Jumlah Tindak Kejahatan |
|--|--|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Kejahatan terhadap Nyawa | | |
| 1 | Pembunuhan | 2 |
| Kejahatan terhadap Fisik/Badan | | |
| 2 | Penganiayaan Ringan | 39 |
| 3 | Penganiayaan Berat | 0 |
| 4 | Kekerasan dalam Rumah Tangga | 7 |
| Kejahatan terhadap Kesusilaan | | |
| 5 | Perkosaan | 2 |
| 6 | Pencabulan | 0 |
| Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang | | |
| 7 | Penculikan | 0 |
| 8 | Mempekerjakan Anak Dibawah Umur | 0 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan | | |
| 9 | Pencurian dengan Kekerasan | 2 |
| 10 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi) | 0 |
| 11 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam) | 0 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang | | |
| 12 | Pencurian | 30 |
| 13 | Pencurian dengan pemberatan | 0 |
| 14 | Pencurian Kendaraan Bermotor | 16 |
| 15 | Pengrusakan/Penghancuran Barang | 13 |
| 16 | Pembakaran dengan Sengaja | 2 |
| 17 | Penadahan | 0 |
| Kejahatan Terkait Narkotika | | |
| 18 | Narkotika dan Psikotropika | 0 |
| Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi | | |
| 19 | Penipuan/Perbuatan Curang | 12 |
| 20 | Penggelapan | 6 |
| 21 | Korupsi | 0 |
| Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum | | |
| 22 | Terhadap Ketertiban Umum | 0 |

Sumber: Polda/Polres/Polresta Papua Barat

Tabel 11. Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Sorong, 2021

| No | Kelompok Kejahatan | Jumlah Tindak Kejahatan |
|--|--|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Kejahatan terhadap Nyawa | | |
| 1 | Pembunuhan | 0 |
| Kejahatan terhadap Fisik/Badan | | |
| 2 | Penganiayaan Ringan | 0 |
| 3 | Penganiayaan Berat | 31 |
| 4 | Kekerasan dalam Rumah Tangga | 1 |
| Kejahatan terhadap Kesusilaan | | |
| 5 | Perkosaan | 3 |
| 6 | Pencabulan | 0 |
| Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang | | |
| 7 | Penculikan | 0 |
| 8 | Mempekerjakan Anak Dibawah Umur | 0 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan | | |
| 9 | Pencurian dengan Kekerasan | 15 |
| 10 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi) | 0 |
| 11 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam) | 0 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang | | |
| 12 | Pencurian | 12 |
| 13 | Pencurian dengan pemberatan | 34 |
| 14 | Pencurian Kendaraan Bermotor | 89 |
| 15 | Pengrusakan/Penghancuran Barang | 8 |
| 16 | Pembakaran dengan Sengaja | 1 |
| 17 | Penadahan | 0 |
| Kejahatan Terkait Narkotika | | |
| 18 | Narkotika dan Psikotropika | 2 |
| Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi | | |
| 19 | Penipuan/Perbuatan Curang | 13 |
| 20 | Penggelapan | 3 |
| 21 | Korupsi | 0 |
| Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum | | |
| 22 | Terhadap Ketertiban Umum | 0 |

Sumber: Polda/Polres/Polresta Papua Barat

Tabel 12. Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Raja Ampat, 2021

| No | Kelompok Kejahatan | Jumlah Tindak Kejahatan |
|--|--|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Kejahatan terhadap Nyawa | | |
| 1 | Pembunuhan | 0 |
| Kejahatan terhadap Fisik/Badan | | |
| 2 | Penganiayaan Ringan | 15 |
| 3 | Penganiayaan Berat | 0 |
| 4 | Kekerasan dalam Rumah Tangga | 5 |
| Kejahatan terhadap Kesusilaan | | |
| 5 | Perkosaan | 0 |
| 6 | Pencabulan | 4 |
| Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang | | |
| 7 | Penculikan | 0 |
| 8 | Mempekerjakan Anak Dibawah Umur | 0 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan | | |
| 9 | Pencurian dengan Kekerasan | 0 |
| 10 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi) | 0 |
| 11 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam) | 2 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang | | |
| 12 | Pencurian | 29 |
| 13 | Pencurian dengan pemberatan | 1 |
| 14 | Pencurian Kendaraan Bermotor | 7 |
| 15 | Pengrusakan/Penghancuran Barang | 2 |
| 16 | Pembakaran dengan Sengaja | 1 |
| 17 | Penadahan | 0 |
| Kejahatan Terkait Narkotika | | |
| 18 | Narkotika dan Psikotropika | 0 |
| Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi | | |
| 19 | Penipuan/Perbuatan Curang | 3 |
| 20 | Penggelapan | 0 |
| 21 | Korupsi | 0 |
| Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum | | |
| 22 | Terhadap Ketertiban Umum | 3 |

Sumber: Polda/Polres/Polresta Papua Barat

Tabel 13. Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Maybrat, 2021

| No | Kelompok Kejahatan | Jumlah Tindak Kejahatan |
|--|--|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Kejahatan terhadap Nyawa | | |
| 1 | Pembunuhan | 2 |
| Kejahatan terhadap Fisik/Badan | | |
| 2 | Penganiayaan Ringan | 4 |
| 3 | Penganiayaan Berat | 0 |
| 4 | Kekerasan dalam Rumah Tangga | 1 |
| Kejahatan terhadap Kesusilaan | | |
| 5 | Perkosaan | 2 |
| 6 | Pencabulan | 0 |
| Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang | | |
| 7 | Penculikan | 0 |
| 8 | Mempekerjakan Anak Dibawah Umur | 0 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan | | |
| 9 | Pencurian dengan Kekerasan | 1 |
| 10 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi) | 0 |
| 11 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam) | 0 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang | | |
| 12 | Pencurian | 1 |
| 13 | Pencurian dengan pemberatan | 0 |
| 14 | Pencurian Kendaraan Bermotor | 0 |
| 15 | Pengrusakan/Penghancuran Barang | 3 |
| 16 | Pembakaran dengan Sengaja | 1 |
| 17 | Penadahan | 0 |
| Kejahatan Terkait Narkotika | | |
| 18 | Narkotika dan Psikotropika | 0 |
| Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi | | |
| 19 | Penipuan/Perbuatan Curang | 1 |
| 20 | Penggelapan | 1 |
| 21 | Korupsi | 0 |
| Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum | | |
| 22 | Terhadap Ketertiban Umum | 0 |

Sumber: Polda/Polres/Polresta Papua Barat

Tabel 14. Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Manokwari Selatan, 2021

| No | Kelompok Kejahatan | Jumlah Tindak Kejahatan |
|--|--|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Kejahatan terhadap Nyawa | | |
| 1 | Pembunuhan | 0 |
| Kejahatan terhadap Fisik/Badan | | |
| 2 | Penganiayaan Ringan | 4 |
| 3 | Penganiayaan Berat | 3 |
| 4 | Kekerasan dalam Rumah Tangga | 0 |
| Kejahatan terhadap Kesusilaan | | |
| 5 | Perkosaan | 0 |
| 6 | Pencabulan | 0 |
| Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang | | |
| 7 | Penculikan | 0 |
| 8 | Mempekerjakan Anak Dibawah Umur | 0 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan | | |
| 9 | Pencurian dengan Kekerasan | 3 |
| 10 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi) | 0 |
| 11 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam) | 0 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang | | |
| 12 | Pencurian | 0 |
| 13 | Pencurian dengan pemberatan | 0 |
| 14 | Pencurian Kendaraan Bermotor | 0 |
| 15 | Pengrusakan/Penghancuran Barang | 4 |
| 16 | Pembakaran dengan Sengaja | 0 |
| 17 | Penadahan | 0 |
| Kejahatan Terkait Narkotika | | |
| 18 | Narkotika dan Psikotropika | 0 |
| Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi | | |
| 19 | Penipuan/Perbuatan Curang | 0 |
| 20 | Penggelapan | 0 |
| 21 | Korupsi | 0 |
| Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum | | |
| 22 | Terhadap Ketertiban Umum | 0 |

Sumber: Polda/Polres/Polresta Papua Barat

Tabel 15. Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kota Sorong, 2021

| No | Kelompok Kejahatan | Jumlah Tindak Kejahatan |
|--|--|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Kejahatan terhadap Nyawa | | |
| 1 | Pembunuhan | 4 |
| Kejahatan terhadap Fisik/Badan | | |
| 2 | Penganiayaan Ringan | 107 |
| 3 | Penganiayaan Berat | 0 |
| 4 | Kekerasan dalam Rumah Tangga | 13 |
| Kejahatan terhadap Kesusilaan | | |
| 5 | Perkosaan | 8 |
| 6 | Pencabulan | 4 |
| Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang | | |
| 7 | Penculikan | 0 |
| 8 | Mempekerjakan Anak Dibawah Umur | 1 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan | | |
| 9 | Pencurian dengan Kekerasan | 28 |
| 10 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi) | 0 |
| 11 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam) | 2 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang | | |
| 12 | Pencurian | 37 |
| 13 | Pencurian dengan pemberatan | 66 |
| 14 | Pencurian Kendaraan Bermotor | 132 |
| 15 | Pengrusakan/Penghancuran Barang | 26 |
| 16 | Pembakaran dengan Sengaja | 6 |
| 17 | Penadahan | 0 |
| Kejahatan Terkait Narkotika | | |
| 18 | Narkotika dan Psikotropika | 0 |
| Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi | | |
| 19 | Penipuan/Perbuatan Curang | 60 |
| 20 | Penggelapan | 32 |
| 21 | Korupsi | 0 |
| Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum | | |
| 22 | Terhadap Ketertiban Umum | 0 |

Sumber: Polda/Polres/Polresta Papua Barat

Tabel 16. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Perkelahian Massal di Wilayahnya di Papua Barat, 2021

| Kabupaten/Kota | Ada Kejadian Perkelahian Massal | | Tidak Ada Kejadian Perkelahian Massa | | Jumlah Desa/Kelurahan | |
|--------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|------------|
| | N | % | N | % | N | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Fakfak | 11 | 7,38 | 138 | 92,62 | 149 | 100 |
| Kaimana | 1 | 1,16 | 85 | 98,84 | 86 | 100 |
| Teluk Wondama | 0 | 0 | 76 | 100 | 76 | 100 |
| Teluk Bintuni | 6 | 2,29 | 255 | 97,71 | 261 | 100 |
| Manokwari | 11 | 6,35 | 162 | 93,65 | 173 | 100 |
| Sorong Selatan | 6 | 4,87 | 127 | 95,13 | 123 | 100 |
| Sorong | 6 | 2,32 | 251 | 97,68 | 257 | 100 |
| Raja Ampat | 10 | 8,26 | 111 | 91,74 | 121 | 100 |
| Tambrauw | 4 | 1,85 | 211 | 98,15 | 215 | 100 |
| Maybrat | 10 | 3,84 | 250 | 96,16 | 260 | 100 |
| Manokwari Selatan | 0 | 0 | 57 | 100 | 57 | 100 |
| Pegunungan Arfak | 1 | 0,60 | 165 | 99,4 | 166 | 100 |
| Kota Sorong | 9 | 21,95 | 32 | 78,05 | 41 | 100 |
| Papua Barat | 70 | 3,53 | 1 915 | 96,47 | 1 985 | 100 |

Sumber: BPS, Pendataan Podes 2021

Tabel 17. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dan Kabupaten/Kota, 2021

| Kabupaten/Kota | Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| | Pembangunan/ pemeliharaan pos keamanan lingkungan | Pembentukan /pengaturan regu keamanan | Penambahan jumlah anggota hansip/linmas | Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan | Pengaktifan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Fakfak | 55 | 64 | 17 | 52 | 25 |
| Kaimana | 5 | 10 | 6 | 37 | 23 |
| Teluk Wondama | 11 | 10 | 7 | 17 | 20 |
| Teluk Bintuni | 27 | 33 | 16 | 51 | 59 |
| Manokwari | 36 | 37 | 11 | 21 | 47 |
| Sorong Selatan | 10 | 8 | 11 | 39 | 5 |
| Sorong | 46 | 40 | 15 | 46 | 66 |
| Raja Ampat | 20 | 40 | 10 | 53 | 25 |
| Tambrauw | 3 | 10 | 5 | 12 | 12 |
| Maybrat | 6 | 10 | 6 | 33 | 16 |
| Manokwari Selatan | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Pegunungan Arfak | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Kota Sorong | 34 | 17 | 0 | 4 | 25 |
| Papua Barat | 239 | 312 | 107 | 456 | 334 |

Sumber: BPS, Pendataan Podes 2021

Tabel 18. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat, 2021

| Kabupaten/Kota | Pos Polisi (Termasuk, Polsek, Polres, Polda) | | Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kelurahan yang Tidak Ada Pos Polisi) | | | |
|--------------------|---|--------------|--|------------|------------|-----------------|
| | Ada | Tidak Ada | Sangat Mudah | Mudah | Sulit | Sangat Sulit |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Fakfak | 7 | 142 | 19 | 62 | 55 | 6 |
| Kaimana | 10 | 76 | 6 | 18 | 37 | 15 |
| Teluk Wondama | 7 | 69 | 8 | 23 | 30 | 8 |
| Teluk Bintuni | 17 | 245 | 16 | 93 | 99 | 37 |
| Manokwari | 12 | 161 | 13 | 113 | 34 | 1 |
| Sorong Selatan | 10 | 113 | 5 | 48 | 35 | 25 |
| Sorong | 12 | 245 | 3 | 66 | 107 | 69 |
| Raja Ampat | 8 | 113 | 2 | 30 | 63 | 18 |
| Tambrauw | 4 | 211 | 11 | 44 | 103 | 53 |
| Maybrat | 4 | 256 | 15 | 125 | 88 | 28 |
| Manokwari Selatan | 4 | 53 | 4 | 19 | 25 | 5 |
| Pegunungan Arfak | 2 | 164 | 2 | 18 | 67 | 77 |
| Kota Sorong | 11 | 30 | 5 | 21 | 4 | 0 |
| Papua Barat | 108 | 1 878 | 109 | 680 | 747 | 342 |

Sumber: BPS, Pendataan Podes 2021

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

•orientasi Pelayanan •kuntabel •kompeten
•harmonis •loyal •daptif •kolaboratif

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jl. Trikora Sowi IV, Manokwari - Papua Barat, 98315
Telp. (0986) 214199, Fax (0986) 214199, Email: bps9100@bps.go.id
Website: papuabaratsbps.go.id

ISSN 2654-9891



9 772654 989000